SKETSA PERJALANAN PERS MAHASISWA INDONESIA[1]

Oleh: Luqman Hakim Arifin[2]

Setiap generasi adalah manusia baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari kemampuan dan mengembangkan karakter publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi. Sikap mental ini harus ditanamkan dan dibiasakanmelalui bahasa dan kajian serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukan "mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya,"tetapi harus selalu secara sadar direproduksi, dari generasi ke generasi.
(Alexis de Toqueville)

SKETSA TETAP SAJA SKETSA—yang sementara dan sekilas. Tapi sebagai gambaran sekilas perjalanan persma, paparan di bawah ini barangkali dapat membantu kita dalam membaca gegap gempita perjalanan pers mahasiswa (persma) Indonesia. Paparan dibawah ini adalah klasifikasi yang saya buat berdasarkan penjelasan Didik Supriyanto dalam bukunya "Perlawanan Pers Mahasiswa Pasca NKK/BKK" (1998). Dan tentu saja, dengan menambah beberapa informasi dan komentar di dalamnya.

Sejak kemunculannya pertama kali di zaman kolonial tahun 1925 sampai sekarang, persma seperti identik dengan (dinamika) gerakan mahasiswanya. Datang dan perginya persma Indonesia erat kaitannya situasi nasional yang ada, atau lebih khusus lagi dengan menguat dan melemahnya gerakan mahasiswa. Pernyataan ini memang ada benarnya. Fluktuasi persma dari era 1920-an sampai era 1980-an akhir menjelaskan persoalan ini. Secara kronologis sebagai berikut:

1. Zaman kolonial (1920-an). Persma digunakan sebagai media untuk menyebarkan gagasan nasionalisme dan kemerdekaan. Langkah awal ini dilakukan *Indische Vereeneging* (Perhimpunan Indonesia), sekelompok mahasiswa pribumi yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Mereka menerbitkan majalah yang dinamai "Indonesia Merdeka" (1925).

2. Masa pendudukan Jepang (1940-1945). Persma kurang hidup karena politik represif dan akomodatif Jepang. Persma yang sebelumnya merupakan media penyebarluasan gagasan nasionalisme dan kemerdekaan, tidak dapat lagi dilakukan karena ide-ide semacam itu seakan-akan diakomodasi Jepang, akibatnya kehadiran persma sebagai alat propaganda tidak dibutuhkan lagi. Namun demikian, pada masa yang singkat itu beredar brosur stensilan yang dikeluarkan para pejuang kemerdekaan secara diam-diam. (Siregar: 1983;38).

3. Masa pasca kemerdekaan (1945-1950-an). Persma kembali hidup dengan warna intelektual yang sangat kuat. Persma mencoba selalu bersikap obyektif dan kritis dalam menyoal setiap masalah yang ada. Persma pasca kemerdekaan ini memang tumbuh sangat mengesankan. Tercatat, Konsolidasi Persma Indonesia pertama terjadi pada tanggal 8 Agustus 1955 di Kaliurang Yogyakarta. Hasilnya, terbentuk dua organisasi Persma, yaitu Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia

---

[1] Disampaikan dalam Diklat Intern majalah MAHKAMAH Fak. Hukum UGM (9 Oktober 2000). Makalah ini pernah disampaikan dalam Diskusi Jurnalistik "Pekan Pers Mahasiswa Universitas Padjajaran Bandung"(20 Mei 2000), dan mengalami beberapa perubahan dan tambahan.
[2] Mantan Pemimpin Redaksi Majalah BALAIRUNG UGM. Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM.

(IWMI) dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI), yang selanjutnya pada Konsperensi Pers Mahasiswa II (1958) disatukan menjadi Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI).

4. Zaman demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal (1960-1967). Persma meninggalkan warna intelektualnya. Persma karena situasi dan kondisi politik yang berkembang saat itu berubah menjadi media politik kelompok, golongan atau partai tertentu. Isinya, tentu saja berupa agitasi dan provokasi. Persma pada fase ini banyak menyerang kebijakan Soekarno yang PKI-*minded*. Beberapa nama media yang dapat disebut antara lain; *Mahasiswa Indonesia, Harian KAMI, Mimbar Demokrasi dan Gelora Mahasiswa Indonesia.*

5. Awal era orde baru (1968-1970). Persma bersama-sama dengan pemerintah baru aktif mencari, merumuskan dan menegakkan ideologi pembangunan. Inilah bulan madu persma dengan Orde Baru. Raillon (1986:332) menyimpulkan: "*....Selama hampir delapan tahun—pada hampir 400 penerbitan—Mahasiswa Indonesia secara teratur mengemukakan gagasan-gagasan yang intinya berupa keinginan mereka terhadap modernisasi dan pembangunan di Indonesia.*"

6. Setelah pemilu tahun 1971 (1971-1974). Persma balik mengkritik Orde Baru. Dan tepatnya tahun 1974, peristiwa Malari meletus dan berakhirlah bulan madu persma-Orde Baru. Pemimpin-pemimpin mahasiswa diadili, persma-persma dibredel seiring dibredelnya pers-pers umum.

7. Setelah peristiwa Malari (1974-1978). Persma muncul dengan format baru. Sejalan dengan kebijakan penarikan ormas mahasiswa dari kampus, persma dimasukkan ke dalam subsistem universitas. Mulai tahun 1976 bermunculan persma-persma baru dari kampus-kampus yang masuk dalam struktur Dewan Mahasiswa; *Salemba* dari UI, *Gelora Mahasiswa* dari UGM, *Kampus* dari ITB. Persma pada fase ini, meski mempunyai ketergantungan yang kuat pada bidang dana kepada universitas, namun ketergantungan itu tidak menyebabkan surutnya kebebasan dan keberanian persma dalam menyoal setiap fenomena yang ada. Sikap anti Soeharto, bahkan tercermin jelas pada persma yang terbit menjelang Pemilu 1977 dan Sidang Umum MPR 1978. Tak heran jika persma ujung-ujungnya, seperti juga pers-pers umum yang "nakal", dilarang terbit.

8. Pasca keluarnya peraturan NKK/BKK (1978-1980). Persma, jika sebelumnya masuk dalam struktur Dewan Mahasiswa, pada fase ini diharuskan masuk dalam struktur BKK. Namun demikian, di beberapa universitas persma masih diberi kesempatan berada di luar BKK (Badan Koordinasi Kampus). Dan untuk menjaga independensinya, terbentuklah struktur baru berupa Biro Penerbitan Pers Universitas yang langsung di bawah tanggung jawab rektor. Tapi fase ini pun tak juga ramah bagi persma. Sikap kerasnya mengenai pengadilan mahasiswa dan NKK/BKK akhirnya mengantarkan mereka pada cerita lama: pembredelan. Belum seberapa lama mereka hidup, persma seperti *Gelora Mahasiswa* dibredel (1979). Menyusul kemudian *Derap Mahasiswa* IKIP Yogyakarta, *Almamater* IPB, *Media* ITS, *Airlangga* Unair, *Kampus* ITB, dan terakhir *Salemba* UI (1980).

9. Masa pemberlakuan NKK/BKK (1980-1985). Persma mengalami kelesuhan sekaligus pembekuan. Beberapa persma memang tetap eksis, seperti *Himmah* UII,

atau *Arena* IAIN Sunan Kalijaga, tapi secara umum kehadiran mereka tidak banyak membawa arti bagi dinamika persma secara umum. Hal ini tidak terlepas dari situasi politik waktu itu, dalam hal ini peraturan-peraturan pemerintah yang terus mengkooptasi persma. Selain masuk dalam struktur BKK, persma juga harus memiliki Surat Tanda Terdaftar (STT)--yang sebenarnya dikeluarkan sesudah peristiwa Malari (1974). Persma masuk dalam kontrol Departemen Penerangan lewat Direktorat Jenderal Penerangan Pers dan Grafika (PPG).

Bahkan, pada tanggal 31 Mei 1980, Depdikbud bersama Deppen membentuk *Tim Pembina Pers Kampus Mahasiswa Tingkat Nasional*. Hasilnya, Tim Pembina membedakan tiga jenis penerbitan yang berkaitan dengan eksistensi persma: *Penerbitan Kampus, Pers Kampus Mahasiswa* dan *Pers Mahasiswa* (Dirjen PPG, Sukarno, Deppen, 1982:56). *Penerbitan Kampus* adalah semua bentuk penerbitan yang diselengarakan oleh kampus dan untuk kepentingan kampus. *Pers Kampus Mahasiswa* adalah bentuk penerbitan berkala yang diselenggarakan oleh mahasiswa di dalam kampus dan untuk kepentingan kampus. *Pers Mahasiswa* adalah semua bentuk penerbitan yang dikelola mahasiswa di luar kaitan kampus. *(Nah 'kan?)*

Hal ini jelas merupakan upaya membatasi ruang gerak persma. Dan tampak jelas di sini bahwa pemerintah sebenarnya lebih menyukai penerbitan mahasiswa yang bersifat khusus yang diterbitkan mahasiswa jurusan atau fakultas daripada yang diterbitkan mahasiswa di tingkat universitas. Karena yang terakhir lebih cenderung menyoal hal-hal umum dan bahaya! Itulah sebabnya pembredelan persma tahun 1979-1980 tidak diikuti pembredelan persma-persma di tingkat fakultas.

Namun meski dapat dikatakan vakum, aktivis persma terus menjalankan kegiatan non-penerbitannya lewat IPMI. Tercatat tidak kurang dua puluh kali pendidikan pers sepanjang tahun 1980-1982 dilakukan IPMI di seluruh Indonesia (BALAIRUNG; Edisi Khusus/1987). Selebihnya IPMI gagal mengadakan kongres yang ujung-ujungnya: IPMI mati dan aktivitas persma pun hilang dari dunia kampus. Sebaliknya, pada fase ini mahasiswa lebih banyak tersedot keluar kampus, melalui kelompok-kelompok studi atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang waktu itu memang *booming*.

10. Pengaruh dan masa NKK/BKK masih terasa (1985-1990-an). Tapi masa ini adalah bangkitnya persma dengan format baru. Berdirinya majalah BALAIRUNG UGM (1985) dan Solidaritas UNAS (1986) memberi nuansa tersendiri pada kehidupan persma Indonesia. Berbagai kegiatan yang berbau jurnalistik bermunculan. Dari diklat jurnalistik, seminar sampai menjamurnya penerbitan-penerbitan mahasiswa, baik dari fakultas ataupun universitas. Secara umum warna intelektual sangat kental pada kedua persma tersebut, sebagai satu contoh.

    Format baru persma fase ini juga dapat dilihat dari munculnya konsep jurnalisme struktural, yang artinya bahwa tugas seorang aktivis persma tidak semata-mata menerbitkan majalah atau koran, tapi bisa juga mengadakan seminar, diskusi, membuat statemen bahkan selebaran gelap. Tegasnya setiap aktivitas yang betujuan menumbuhkan kesadaran kritis bisa dianggap aktivitas persma. Rentang waktu setelah itu adalah pengonsolidasian persma dengan kelompok-kelompok

studi, kelompok-kelompok aksi dan LSM. Pemerintahan Orde Baru yang represif-otoriter jelas punya pengaruh besar terhadap kondisi ini.

Awal tahun 1990-an sampai peristiwa reformasi Mei 1998, persma seperti entitas yang menganut paham: *Let's Everything Goes* (Bagaimana [pun] harus bergerak). Bulan madu dengan kelompok studi, kelompok aksi atau LSM memang sudah berakhir. Kalaupun banyak aktivisnya yang terlibat gerakan mahasiswa, kebanyakan mengatasnamakan pribadi, bukan lembaga. Namun demikian peristiwa reformasi Mei 1998 mengantar persma, mengutip *Time*, sebagai "kekuatan pendukung yang tak terduga".

Patut dicatat juga adalah upaya mengotak-atik "jasad" IPMI. Perkembangan yang pesat persma-persma di berbagai universitas memunculkan kembali semangat untuk menciptkan wahana bagi aktivisnya. IPMI yang gagal dihidupkan pada Kongres IPMI VI (1989) coba dihidupkan, tapi tetap saja, ia memang harus dikubur. Kegagalan berkongres IPMI ini membuat aktivitas persma kembali menurun. Catatan Didik berhenti sampai di sini.

***

SELANJUTNYA IPMI berubah menjadi PPMI (Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia) yang berdiri tahun 1992 di Malang. Dan terus berjalan sampai kemudian sebuah "perpisahan" terjadi di pulau Lombok (2000).

PPMI mengalami metamoforsis—karena berbagai persoalan. Dalam Kongresnya yang ke-5 di Mataram, NTB, 24—29 Mei 2000, PPMI akhirnya pecah jadi dua. Selain PPMI, kini terbentuk wadah baru lembaga-lembaga pers mahasiswa. Namanya, "Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Indonesia" (FKPMI). Mereka yang tergabung, tentu saja, adalah mereka yang tak puas dengan keberadaan PPMI selama ini. Dan tidak tanpa alasan. Wadah yang baru saja terbentuk itu pada dasarnya adalah ide lama dalam "wacana pembaharuan" di tubuh PPMI. Hanya sayangnya kurang mendapat tempat.

Oleh karena itu, bagi banyak aktivisnya, pecahnya PPMI jelas bukan peristiwa yang mengagetkan. Ibarat (menuju) *satu tujuan* (dari) *banyak jalan*, pilihan jalannya pun bisa bermacam-macam; ada yang terjal, ada yang mulus, ada yang cepat, ada juga yang lambat.

Namun, sampai di sini bolehlah kita bertanya, benarkah keduanya benar-benar telah dan akan menjawab "kebutuhan" para aktivis pers mahasiswa dan LPM-LPMnya? Mampukah keduanya memberikan kontribusi riil terhadap mereka, atau jangan-jangan keduanya kembali berkutat dengan penyakit lamanya: *usreg* terus, tapi tak jelas kerja dan kontribusinya?

Yogyakarta, 08 Oktober 2000